

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi atas Audit Sektor Publik Berperan Dalam Pencegahan *Fraud*, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan, sekaligus memberikan saran sebagai berikut :

1. Implementasi audit sektor publik pada Inspektorat Kota Pangkalpinang sudah cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh proses pelaksanaan audit, kebijaksanaan prosedur yang mempengaruhi jalannya kinerja, dan penerapan dari regulasi serta standar audit yang telah ditentukan. Masih menjadi kendala pada implementasi audit sektor publik, yaitu mengenai pelaksanaan audit berbasis resiko yang belum sepenuhnya dilaksanakan.
2. Pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang sudah berkualitas. Hal ini ditunjukkan dari wawancara dengan auditor, dimana selama ini Inspektorat Kota Pangkalpinang telah melaksanakan pencegahan *fraud* dengan acuan berbagai teori yang ada serta telah melaksanakan pencegahan *fraud* dengan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam proses perencanaan audit belumlah optimal dilaksanakan, seharusnya proses perencanaan audit adalah tahap awal yang paling baik untuk meminimalisir terjadinya *fraud*. Kuantitas Auditor dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang hanya 11 orang auditor dan P2UPD terdiri dari 9 orang Auditor dan 3 P2UPD yang

sudah bersertifikat. Serta pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang penyelenggaraannya masih sangat terbatas.

3. Implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* pada Inspektorat Kota Pangkalpinang, dimana semakin baik implementasi audit sektor publik akan membuat pencegahan *fraud* tinggi atau sebaliknya. Kendala yang terdeteksi dalam implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* di penelitian ini yaitu keterbatasan auditor untuk masuk ke penyebab inti *fraud*, kemudian komunikasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang kurang intens sehingga berdampak pada tindak lanjut yang sederhana, dan Organisasi Perangkat Daerah yang belum mau berbenah walaupun telah diberikan saran atas masalah yang timbul di Organisasi Perangkat Daerah tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran sabagai bahan evaluasi anantara lain:

1. Implementasi audit sektor publik berperan dalam pencegahan *fraud* hendaknya semakin ditingkatkan pada penerapan audit berbasis resiko, karena pengaruhnya sangat tinggi dimana audit berbasis resiko adalah suatu audit yang dimulai dengan proses penilaian audit sehingga dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan auditnya lebih difokuskan pada area-area penting yang berisiko dari penyimpangan atau *fraud*.

2. Untuk Pencegahan *fraud* itu sendiri lebih ditingkatkan proses audit perencanaannya, karena proses audit perencanaan adalah tahap awal yang paling baik untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Seharusnya Inspektorat Kota Pangkalpinang memiliki lebih banyak lagi sumber daya manusia pada jabatan Auditor dan P2UPD dan seharusnya lebih giat lagi dalam penyelenggaraan pendidikan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Inspektorat Kota Pangkalpinang itu sendiri mengingat *fraud* yang ada semakin tinggi.

3. Keterbatasan auditor untuk masuk ke penyebab inti *fraud* dapat diusahakan lagi dengan meminta instruksi langsung dari Pimpinan Kepala Daerah langsung, kemudian diharapkan para auditor bisa berkomunikasi lebih baik lagi kepada organisasi perangkat daerah dalam memberikan saran serta pembenahan sehingga apa yang disarankan bisa diterima dengan baik pula. Semoga Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang bisa menerima masukan atau saran dari auditor dan melaksanakan apa saja kekurangan yang perlu diperbaiki selanjutnya, sehingga Organisasi Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang menjadi lebih baik lagi dan bisa menciptakan kesejahteraan dan pelayanan bagi masyarakat Kota Pangkalpinang secara merata.